

Model-Model Manajemen Publik

Materi ini membahas berbagai model manajemen public

1. Manajemen publik klasik
2. New Public Management (NPM)
3. Governansi publik.

Tujuannya adalah agar mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik masing-masing model dan membedakannya berdasarkan fokus, prinsip, dan praktiknya.

Vina Karmilasari, S.Pd.,M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi negara FISIP Unila



Tujuan Pembelajaran

1 Memahami Manajemen Publik Klasik

Menjelaskan karakteristik manajemen publik klasik, termasuk efficiency drive, downsizing, in search of excellence, dan public service.

2 Memahami New Public Management

Menjelaskan karakteristik New Public Management (NPM) dan prinsip-prinsipnya yang mengadopsi pendekatan sektor privat ke dalam sektor publik.

3 Memahami Governansi Publik

Menjelaskan konsep dan karakteristik governansi publik yang menekankan kolaborasi dan partisipasi multi-stakeholder.

4 Membedakan Model-Model

Membedakan model-model manajemen publik berdasarkan fokus, prinsip, dan praktiknya dalam konteks penerapan di Indonesia.



Manajemen Publik Klasik: Sejarah dan Perkembangan

1

Akhir Abad ke-19

Manajemen publik klasik mulai berkembang dengan fokus pada efisiensi, hierarki, dan profesionalisme dalam birokrasi pemerintahan.

2

Awal Abad ke-20

Pengaruh pemikiran Frederick Taylor tentang scientific management yang menekankan standardisasi, spesialisasi, dan pengukuran kinerja.

3

Pertengahan Abad ke-20

Berkembangnya gerakan efficiency drive, downsizing, in search of excellence, dan public service sebagai respons terhadap kebutuhan reformasi birokrasi.

4

Era Reformasi

Penerapan prinsip manajemen publik klasik dalam reformasi birokrasi di berbagai negara, termasuk Indonesia pasca Orde Baru.





Efficiency Drive: Gerakan Efisiensi

Pengertian

Gerakan yang bertujuan meningkatkan efisiensi dalam organisasi publik melalui pendekatan ilmiah dan sistematis. Dipengaruhi oleh pemikiran Frederick Taylor tentang "one best way" untuk menyelesaikan pekerjaan.

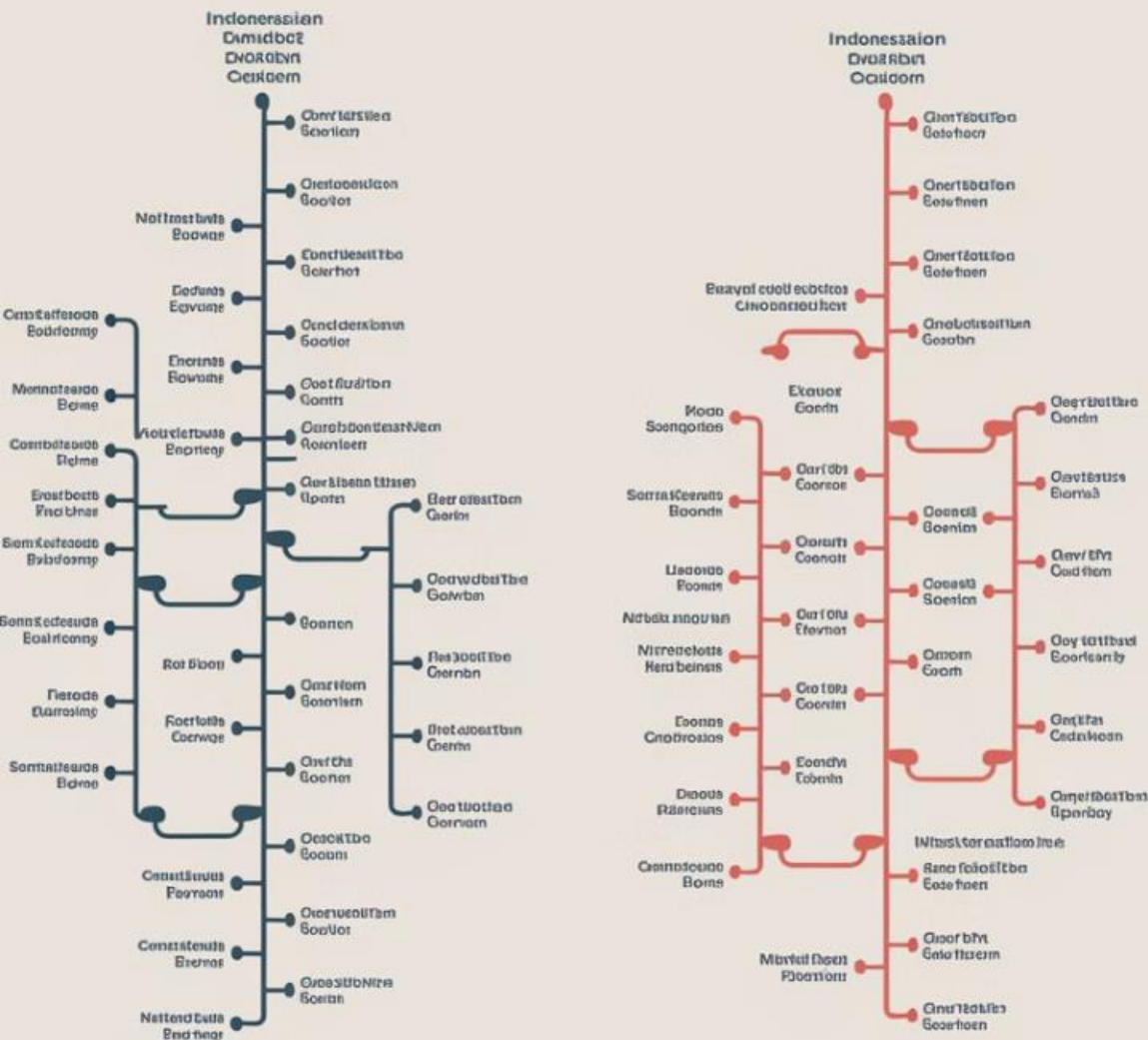
Prinsip Utama

Standardisasi prosedur kerja, spesialisasi tugas berdasarkan keahlian, dan pengukuran kinerja menggunakan indikator yang terukur untuk mengevaluasi efisiensi.

Contoh di Indonesia

Reformasi birokrasi melalui sistem Online Single Submission (OSS) untuk perizinan dan program e-Government seperti e-KTP, e-Budgeting, dan SIMDA untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.

Downsizing: Penataan Ulang Organisasi



Pengertian

Upaya mengurangi ukuran birokrasi dengan menghapus posisi atau unit yang tidak diperlukan, menyederhanakan struktur organisasi, dan meningkatkan efisiensi melalui pengurangan biaya operasional.

Tujuan

Menciptakan organisasi yang lebih ramping, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perubahan lingkungan.

Contoh di Indonesia

Reformasi struktural di kementerian dan lembaga seperti penggabungan beberapa kementerian dan rasionalisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui program pensiun dini dan pembatasan rekrutmen.



In Search of Excellence: Mencari Keunggulan



Budaya Organisasi

Menciptakan nilai-nilai inti yang kuat dalam organisasi publik untuk mendorong kinerja unggul dan pelayanan berkualitas.



Kepemimpinan

Mengembangkan pemimpin yang visioner dan inspiratif yang mampu memotivasi pegawai untuk mencapai standar kinerja tinggi.



Inovasi

Mendorong pengembangan produk, layanan, atau proses baru untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.



Fokus pada Pelanggan

Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai pengguna layanan publik.

Public Service: Pelayanan Publik



Contoh penerapan di Indonesia termasuk Program Layanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang menyederhanakan proses perizinan, Gerakan Revolusi Mental untuk mengubah mindset birokrat, dan layanan kesehatan gratis melalui BPJS Kesehatan.

New Public Management (NPM): Pendekatan Bisnis dalam Sektor Publik

1

Muncul pada 1980-an

Respons terhadap ketidakefisienan birokrasi tradisional

2

Adopsi Prinsip Bisnis

Mengadopsi prinsip-prinsip manajemen sektor privat

3

Fokus pada Hasil

Menekankan efisiensi, efektivitas, dan kinerja terukur

4

Orientasi Pelanggan

Memandang masyarakat sebagai pelanggan yang harus dilayani

New Public Management (NPM) muncul sebagai paradigma baru yang mengadopsi prinsip-prinsip manajemen sektor privat ke dalam sektor publik. NPM menekankan efisiensi, kompetisi, dan orientasi pada hasil daripada proses.

Prinsip-Prinsip New Public Management

Desentralisasi

Memberikan kewenangan lebih besar kepada unit-unit lokal untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan. Contoh di Indonesia: Otonomi Daerah melalui UU No. 23 Tahun 2014.

Privatisasi

Menyerahkan sebagian fungsi pemerintah kepada sektor swasta untuk meningkatkan efisiensi melalui mekanisme pasar. Contoh: Privatisasi BUMN seperti PT Telkom dan PT Indosat, serta Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS/P3).

Manajemen Berbasis Kinerja

Fokus pada hasil (outcome) daripada proses (output) dengan akuntabilitas berbasis kinerja. Contoh: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Program Indonesia Pintar (PIP).

Penerapan NPM di Indonesia



Penggunaan Teknologi Informasi

Sistem Online Single Submission (OSS) untuk perizinan usaha dan aplikasi layanan publik seperti JAKI (Jakarta Kini) yang memungkinkan warga mengakses berbagai layanan publik.



Orientasi pada Pelanggan

Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang dirancang untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan kesehatan dan pendidikan.



Fleksibilitas Manajerial

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang memberikan otonomi kepada sekolah dalam mengelola anggaran dan kurikulum, serta pengelolaan Dana Desa oleh pemerintah desa.

Governansi Publik: Kolaborasi dan Partisipasi



Governansi publik muncul sebagai respons terhadap keterbatasan NPM. Model ini menekankan pada kolaborasi, partisipasi, dan jaringan multi-stakeholder dalam pengelolaan urusan publik.

Partisipasi dan Transparansi dalam Governansi Publik

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

Forum partisipatif di mana masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan kebutuhan pembangunan di tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, hingga nasional. Masyarakat diajak berdiskusi untuk menentukan prioritas pembangunan seperti infrastruktur, kesehatan, atau pendidikan.



Portal Informasi Publik

Pemerintah Indonesia mengembangkan portal informasi publik seperti Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIMDA) untuk memastikan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan pengadaan barang/jasa.





Akuntabilitas dan Keadilan dalam Governansi Publik

1 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun LKIP untuk melaporkan capaian kinerja berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Contohnya, Kementerian Kesehatan melaporkan capaian program seperti cakupan imunisasi dan penurunan angka stunting.

2 Audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

BPK melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan negara dan menyampaikan hasilnya kepada publik. Contohnya adalah laporan audit BPK atas penggunaan dana bantuan sosial (bansos) selama pandemi COVID-19.

3 Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP)

Program ini dirancang untuk memberikan akses layanan kesehatan dan pendidikan kepada masyarakat miskin dan rentan. KIS memungkinkan masyarakat miskin mendapatkan layanan kesehatan gratis di fasilitas kesehatan pemerintah.



Kolaborasi Multi-Stakeholder dalam Governansi Publik

1

Penanganan Bencana

Kolaborasi antara BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), PMI (Palang Merah Indonesia), dan perusahaan swasta dalam penanganan bencana alam seperti gempa di Lombok (2018).

2

Program CSR

Perusahaan swasta berkontribusi dalam pembangunan sosial melalui program Corporate Social Responsibility. Contohnya PT Pertamina membangun fasilitas kesehatan dan pendidikan di daerah terpencil.

3

Layanan Pengaduan

Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) untuk menampung keluhan dan aspirasi masyarakat. Warga dapat melaporkan masalah seperti jalan rusak atau pelayanan publik yang buruk.

Setiap model manajemen publik memiliki karakteristik dan prinsip yang berbeda. Manajemen publik klasik fokus pada efisiensi dan hierarki, NPM mengadopsi prinsip-prinsip bisnis, dan governansi publik menekankan kolaborasi dan partisipasi. Pemahaman tentang model-model ini penting untuk merancang strategi manajemen publik yang efektif dan relevan dengan konteks saat ini.